

Pembentukan AUKUS : Solusi atau Polemik di Kawasan Indo-Pasifik?

Ni Putu Eka Tantri Purnamasari¹, Sukma Sushanti²

¹²Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Udayana

Email : tantripnmsr@gmail.com, sukmasushanti@gmail.com

Abstract: The establishment of AUKUS prompted the emergence of various debates in the international arena. AUKUS is committed to creating collective security for the Indo-Pacific region that has strategic potential in the world. However, some observers are of the view that AUKUS is also supposed to be a new manoeuvre for their bloc to offset the aggressive power of Tiongkok. This will cause stability tensions in the Indo-Pacific region to heat up again due to competition between external parties in the region. This discussion became important because AUKUS has a potentially significant impact and is able to shake the global geopolitical realm in the Indo-Pacific. This paper will seek to expose in an analytical way the topics discussed using the theory of neo-realism and qualitative research approaches described in a descriptive way from the elaboration of secondary data collected through methods of literary study. The findings of this paper are that AUKUS is only a leapstone for great powers to their interests and expand their hegemony. The commitment to creating collective security is only a front cover to draw the attention of the Indo-Pacific countries to support their deal plans.

Keywords : AUKUS, collective security, Indo-Pacific, stability

Abstrak: Pembentukan AUKUS mendorong munculnya berbagai perdebatan dalam kancah internasional. AUKUS berkomitmen untuk menciptakan keamanan kolektif bagi kawasan Indo-Pasifik yang memiliki potensi strategis di dunia. Namun, beberapa pengamat berpandangan bahwa AUKUS juga dituding menjadi manuver baru bagi blok mereka untuk mengimbangi kekuatan agresif dari Tiongkok. Hal tersebut tentu menyebabkan tensi stabilitas di Indo-Pasifik kembali memanas akibat persaingan yang terjadi antara pihak eksternal kawasan. Pembahasan ini menjadi penting karena AUKUS memiliki potensi dampak yang cukup besar dan mampu mengguncang ranah geopolitik global terutama di kawasan Indo-Pasifik. Tulisan ini akan berusaha memaparkan secara analisis topik yang dibahas dengan menggunakan teori neo-realisme dan pendekatan penelitian kualitatif yang dijelaskan secara deskriptif dari elaborasi data sekunder yang dikumpulkan melalui metode studi literatur. Hasil temuan dari tulisan ini adalah AUKUS hanya menjadi batu loncatan bagi negara-negara great power untuk mencapai kepentingannya dan memperluas hegemoninya. Komitmen dalam menciptakan keamanan kolektif hanya sebatas sampul depan untuk menarik perhatian negara kawasan Indo-Pasifik agar mendukung rencana kesepakatan mereka.

Kata kunci : AUKUS, keamanan kolektif, Indo-Pasifik, stabilitas

PENDAHULUAN

Kemitraan AUKUS telah mendapatkan berbagai reaksi dari banyak kalangan pengamat isu internasional. Banyak kalangan yang menyebutkan bahwa kemitraan AUKUS adalah sebuah terobosan yang sangat agresif dari Australia, Inggris dan Amerika Serikat untuk melakukan *balance of power* di kawasan Indo-Pasifik. Terlebih lagi *highlight* kesepakatan yang dicanangkan berkaitan dengan pemberdayaan kapal selam yang berbasis

teknologi mutakhir dari ketiga negara dan penggunaan tenaga nuklir. Kesepakatan AUKUS ini menjadi komitmen dari ketiga negara untuk memperdalam kerjasama diplomatik, keamanan dan pertahanan yang telah berlangsung sejak masa Perang Dunia dimana ketiga negara saling berbagi sejarah yang kompleks. Mulai dari Australia yang awalnya merupakan negara persemakmuran Inggris. Kemudian Amerika Serikat dan Inggris yang merupakan sekutu militer sejak masa perang. Hingga Australia memiliki

hubungan formal langsung dengan Amerika Serikat semenjak pembentukan aliansi pertahanan ANZUS pada tahun 1951 (Istri Laksmi Dewi, 2014). Dengan kedekatan tersebut, tidak diragukan lagi bahwa ketiganya membentuk kemitraan baru yang lebih ditingkatkan dalam hal pertahanan dan keamanan melalui AUKUS.

Sasaran kebijakan pembentukan AUKUS terhadap kawasan Indo Pasifik telah memperlihatkan bagaimana potensi yang dimiliki oleh kawasan tersebut. Kawasan Indo-Pasifik merupakan kawasan strategis geografis serta sosial ekonomi yang produktif. Secara biogeografis Indo-Pasifik merujuk pada suatu area yang sangat luas yang terdiri dari kawasan Hindia hingga bagian barat dan tengah Lautan Pasifik, dengan berbagai negara yang ada di dalamnya, seperti negara-negara pantai timur Afrika, Rusia, Asia Selatan, Asia Timur, termasuk Tiongkok, Asia Tenggara, Australia, dan Amerika Serikat (Sinta Herindrasti, 2019). Dengan wilayah yang luas tersebut, Indo-Pasifik telah menjadi subjek utama diskusi tentang geopolitik maritim, keamanan, perdagangan, dan kegiatan lingkungan (Pangestu, Hikmawan, & Fathun, n.d.) Selain itu, Indo-Pasifik juga menyediakan rute pelayaran internasional yang membuatnya menjadi pusat aktivitas ekspor-impor berbagai komoditas seperti, minyak mentah, besi, batu bara, karet, teh, barang manufaktur dan lainnya. Indo-Pasifik juga adalah kawasan majemuk yang menjadi tempat tinggal bagi lebih dari 50% populasi global, lebih dari 3.000 bahasa dan banyak agama, membentang diantara dua samudra dan tiga benua (U.S. Embassy Jakarta, 2021). Berbagai jenis potensi yang dimiliki oleh Indo-Pasifik tersebut, telah membuatnya dipandang sebagai kawasan yang terintegritas.

Keberadaan kawasan Indo-Pasifik yang memberikan kelimpahan potensi dan konektivitas mengundang berbagai negara adidaya untuk memperjuangkan kepentingan strategis mereka di kawasan tersebut. Dua negara adidaya yang memperlihatkan ketertarikan utama pada Indo-Pasifik adalah Amerika Serikat dan Tiongkok Keduanya telah menjalin rivalitas dalam hal politik, militer, ekonomi dan bidang lainnya yang menyasar wilayah Indo-Pasifik sebagai arena kompetisi. Baik

Amerika Serikat maupun Tiongkok, keduanya telah melangsungkan kemitraan dengan negara-negara Indo-Pasifik baik secara bilateral, multilateral, hingga regional. Seperti Amerika Serikat dan Indonesia yang melakukan kerjasama bilateral terkait keamanan melalui program *Indonesia-United States Security Dialogue* (IUSSD); terkait perdagangan dan investasi melalui *Trade and Investment Framework Agreement* (TIFA) hingga keterlibatan sektor non-pemerintahan melalui *United States-Indonesia Society* (USINDO). Di samping itu ada Tiongkok yang juga menawarkan kerjasama sub regional seperti *Greater Mekong Subregion* (GMS) terkait pertumbuhan ekonomi dan keterlibatan Tiongkok dalam berbagai kerjasama Indo-Pasifik lainnya, seperti *East Asia Summit* (EAS). Selain itu, ada beberapa kerjasama yang bersifat terbuka dimana mempertemukan antara negara Indo-Pasifik dengan negara di luar kawasan, seperti *ASEAN Regional Forum* (ARF), *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC) hingga *Asia-Europe Meeting* (ASEM) (Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, n.d.). Berangkat dari terbentuknya berbagai kerjasama yang melibatkan negara maupun regionalisme kawasan Indo-Pasifik telah membuktikan bahwa Indo-Pasifik menjadi kawasan primadona bagi banyak negara adidaya untuk mencapai kepentingan nasional mereka.

Namun sebagai kawasan primadona, hal tersebut tentunya akan menyebabkan peningkatan proyeksi kekuatan yang akan mendorong terjadinya perlombaan senjata hingga eskalasi konflik yang lebih besar. Dua kekuatan besar secara terbuka melakukan tindakan agresif di wilayah Indo-Pasifik termasuk Amerika Serikat. Hal itu dilakukan oleh Amerika Serikat yang melihat potensi strategis bagi kepentingan bisa terhalangi dengan kehadiran pengaruh Tiongkok di Indo-Pasifik. Oleh karena itu, Amerika Serikat melalui kemitraan trilateral AUKUS mengupayakan rencana pemberdayaan kapal selam untuk membendung pengaruh Tiongkok di Indo-Pasifik.

Disepakatinya AUKUS sebagai pakta pertahanan trilateral membawa asumsi dari komunitas internasional bahwa AUKUS menjadi salah satu kebijakan strategis dari

Amerika Serikat dan sekutunya untuk melawan hegemoni dari Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik (Nindya & Abiyaya, 2022). Hal itu terjadi karena melihat sejarah dinamika internasional yang mencatat rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok sejak dahulu. Tiongkok yang sering kali melakukan tindakan agresif di kawasan Indo-Pasifik dengan terus memperluas wilayahnya dengan mengklaim secara sepihak wilayah di Laut Tiongkok Selatan (LTS) menggunakan sembilan garis putus-putus (nine dashed line), yang membuat Tiongkok terlibat dalam konflik perbatasan wilayah dengan beberapa negara di Asia Tenggara (Purwantoro Putro, 2021). Selain itu, keberadaan kebijakan *Belt and Road Initiative* yang merupakan strategi Tiongkok untuk mengembangkan kekuatan ekonomi dan politik di dunia, termasuk di Indo-Pasifik telah membuat Amerika Serikat semakin terancam akan pengaruh dari hegemoni Tiongkok. Itulah yang kemudian mendasari pandangan komunitas internasional dalam pembentukan AUKUS.

Pembentukan AUKUS yang dikatakan bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan Indo-Pasifik menyebabkan terjadinya krisis kepercayaan terhadap pakta pertahanan trilateral tersebut. Walaupun membawa misi penciptaan keamanan kolektif, sebagian negara Indo Pasifik merespon kekhawatiran terhadap pembentukan AUKUS karena dapat memicu peningkatan signifikansi dari proyeksi kekuatan di Indo-Pasifik dan mengancam kestabilan regional. Hal tersebut yang kemudian memunculkan perdebatan mengenai peranannya dan signifikansi terhadap kawasan Indo-Pasifik. Berbagai pandangan mempertanyakan apakah AUKUS bisa menjadi solusi dari ancaman keamanan regional? Atau justru AUKUS menjadi sumber dari kemunculan polemik ancaman baru?

Perjanjian Australia-Inggris-Amerika Serikat sekarang ini sedang menonjol dalam debat keamanan Indo-Pasifik dan tampaknya telah menjadi perlengkapan instan dari susunan arsitektur kelembagaan kawasan yang terkadang membingungkan. AUKUS diperhitungkan memiliki potensi dampak yang cukup signifikan dan mampu

mengguncang ranah geopolitik global khususnya di Indo-Pasifik. Tulisan ini akan berupaya mengulik eksistensi dari pembentukan AUKUS yang meniscayakan dapat menciptakan keamanan dan perdamaian di kawasan Indo-Pasifik. Tulisan ini juga akan membahas mengenai kekhawatiran akan terjadinya potensi eskalasi konflik terjadi karena beberapa sebab termasuk pelanggaran terhadap perjanjian non-proliferasi nuklir yang akan mempengaruhi stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Selain itu, pembahasan tulisan ini juga akan menyangkut mengenai sikap respon dari Tiongkok selaku rival dari Amerika Serikat dan sikap ASEAN dalam menanggapi rencana proyek AUKUS.

TINJAUAN PUSTAKA

Jurnal “Pengaruh AUKUS terhadap Stabilitas Indo-Pasifik dan Sikap Indonesia” yang ditulis oleh Annisa Putri Nindya dan Rifqy Alief Abiyaya membahas tentang dampak dan implikasi dari AUKUS, sebuah pakta keamanan trilateral antara Australia, Inggris, dan Amerika, terhadap stabilitas keamanan di wilayah Indo-Pasifik. Jurnal ini menyatakan bahwa AUKUS menjadi manuver dan titik balik bagi ketiga negara dalam perjuangan melawan dominasi Republik Rakyat Tiongkok yang dianggap mengancam kepentingan aliansi dan stabilitas keamanan di wilayah Indo-Pasifik. Fenomena terbentuknya AUKUS mendorong adanya signifikansi terhadap eskalasi konflik yang mengarah pada kompetisi persenjataan. Selain itu, jurnal ini membahas reaksi dan sikap Indonesia terhadap AUKUS dan implikasinya terhadap kebijakan luar negeri Indonesia yang berlandaskan pada politik luar negeri bebas-aktif. Jurnal ini menyoroti Indonesia yang dilema dalam menentukan sikap yang seharusnya bisa diambil secara tegas atas situasi keamanan di kawasan Indo-Pasifik.

Jurnal “Dampak Pakta Pertahanan Trilateral AUKUS Terhadap Kondisi Regional Indo-Pasifik” yang ditulis oleh Mariane Olivia Delanova menjelaskan mengenai pembentukan AUKUS yang menimbulkan kekhawatiran di antara negara-negara Indo-Pasifik akibat belum terciptanya kepercayaan atas komitmen Australia, Inggris dan Amerika Serikat sebagai negara yang terlibat dalam AUKUS untuk menjaga keamanan kawasan.

Kekhawatiran tersebut juga muncul atas dasar pengaruh yang kuat dari negara great power untuk mengejar kepentingan strategis mereka saja. Pembentukan AUKUS bagi penggagasnya menjadi sebuah pilihan rasional mengingat bahwa keterlibatan dalam dinamika geopolitik dunia sangat penting dilakukan. Penguatan kekuatan dan kapasitas militer menjadi tujuan utama negara berdasarkan pandangan realis agar bisa menghadapi tantangan di abad sekarang. Meskipun AUKUS berkomitmen menjaga keamanan di Indo-Pasifik, AUKUS kurang melibatkan ASEAN sebagai organisasi sentral di kawasan tersebut dalam realisasi kesepakatan AUKUS. Hal tersebut menyebabkan resiko terjadinya perpecahan dalam kawasan akan semakin besar dimana dua kekuatan besar saling berlomba untuk mempertahankan dominasinya di kawasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berusaha menjelaskan topik dengan pendekatan penelitian kualitatif dengan pemahaman yang dijelaskan secara deskriptif dan menyeluruh berdasarkan fakta dari beberapa kutipan yang berkaitan dengan topik pembahasan yakni kemunculan AUKUS yang masih diperhitungkan signifikansi dan peranannya bagi kawasan Indo-Pasifik. Tulisan ini menggunakan data sekunder dengan metode pengolahan data yaitu melalui studi literatur yang dilakukan dengan mencatat dan menganalisis bacaan atau penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan pada tulisan ini. Data pada penelitian ini diperoleh dari referensi yang berasal melalui artikel ilmiah, buku, jurnal, dan lainnya yang mendukung dalam elaborasi penulisan tulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mitos AUKUS sebagai Ide Keamanan Kolektif di Indo-Pasifik

AUKUS - *Australia, United Kingdom, United State* merupakan sebuah pakta pertahanan trilateral yang dibentuk secara resmi pada 15 September 2021. AUKUS menjadi bentuk komitmen bersama dari ketiga negara untuk membangun hubungan trilateral yang semakin progresif guna menghadapi ancaman dan tantangan keamanan yang semakin serius di abad dua

puluh satu. AUKUS adalah penguatan kerjasama militer trilateral yang bertujuan untuk memastikan stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan Indo-Pasifik dengan berfokus pada pengembangan industri dan teknologi militer, terutama dalam hal pembuatan kapal selam bertenaga nuklir (Purwantoro Putro, 2021).

Target Indo-Pasifik sebagai kawasan untuk pelaksanaan proyek AUKUS terbilang langkah yang frontal dari Australia, Inggris dan Amerika Serikat. Geopolitik Indo-Pasifik yang strategis mengundang berbagai ambisi eksternal untuk berkompetisi dalam arena kawasan Indo-Pasifik. Mereka berupaya untuk memperoleh dukungan politik hingga memperkuat kapabilitas militer untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Hal tersebut tentunya mendorong adanya kompetisi kekuatan antar negara-negara great power yang mengejar hegemoni global, seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Pembentukan AUKUS yang menyoal Indo-Pasifik sebagai target proyek dipandang menjadi bisa menjadi pilihan atas distribusi kekuatan yang tidak merata untuk melawan Tiongkok.

AUKUS justru akan semakin meningkatkan ketegangan di kawasan Indo-Pasifik karena kawasan tersebut juga menjadi incaran oposisi dari Amerika Serikat yakni Tiongkok. Tiongkok telah menjadi salah satu kekuatan mendominasi yang berpengaruh di kawasan Indo-Pasifik. Dominasi kekuatan Tiongkok dalam berbagai aspek baik militer maupun ekonomi di kawasan Indo-Pasifik mendorong adanya kekhawatiran dari negara-negara Indo-Pasifik akan pengaruh besar yang dibawa oleh Tiongkok. Tidak jarang, Tiongkok juga melakukan tindakan agresif terhadap negara yang menentang kebijakannya dan mempengaruhi keamanan serta ekonomi kawasan.

Dengan tingkat kekuatan militer dan ekonomi tersebut, Tiongkok sangat berani dalam menentang berbagai negara yang berusaha menghalangi tindakannya untuk mencapai suatu kepentingan. Tercatat bahwa Tiongkok tidak segan untuk melakukan konfrontasi langsung dengan negara lain (seperti Filipina) dan melanggar perbatasan di wilayah perairan Laut Tiongkok Selatan (seperti pelanggaran

batas di wilayah Indonesia) (Delanova, 2021). Hal tersebut menjadi satu dari sekian konflik yang terjadi pada sengketa Laut Tiongkok Selatan. Sengketa Laut Tiongkok Selatan melibatkan enam negara, yaitu Tiongkok (termasuk Taiwan, yang memiliki klaim serupa dengan Tiongkok), Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Perhatian utama dari sengketa Laut Tiongkok Selatan adalah klaim Tiongkok melalui peta sembilan garis putus-putus atau *nine dash line* bahwa sebagian wilayah perairan Laut Tiongkok Selatan merupakan kedaulatan Tiongkok. Namun, klaim tersebut ditentang oleh beberapa negara karena melanggar perbatasan klaim teritorial dan demarkasi laut teritorial serta Zona Ekonomi Eksklusif dari beberapa negara Asia Tenggara. Tiongkok juga secara intensif membangun fasilitas militer, mendirikan pulau buatan, hingga melakukan aktivitas ilegal lainnya di wilayah perairan Laut Tiongkok Selatan guna menjaga klaimnya atas wilayah perairan tersebut.

Melihat keteguhan Tiongkok yang didukung oleh kapabilitas militer dan ekonomi membuat negara *middle power* di kawasan Indo-Pasifik sadar akan kemampuan Tiongkok untuk melakukan serangan jarak jauh. Hal tersebut tentunya juga di sadari oleh Australia sebagai salah satu negara yang ada di kawasan Indo-Pasifik. Australia sadar bahwa tingkat serangan yang dapat dilakukan oleh Tiongkok bisa saja mencapai wilayahnya. Itulah yang meningkatkan ancaman bagi keamanan Australia. Dengan kesadaran tersebut, Australia berupaya membenahi kapabilitas militernya untuk membentuk lingkungan keamanan yang lebih menguntungkan Australia melalui kemitraan AUKUS. Setelah sebelumnya gagal dalam ANZUS dan pembatalan kerjasama kapal selam dengan Prancis, Australia bercita-cita untuk mengubah pandangan strategis mereka dan kembali serius membuat kapal selam untuk menutupi kesenjangan kemampuan militer mereka (Cheng, 2022). Di sisi lain, Australia juga dipercaya sebagai negara yang berada di posisi terdepan bagi Amerika Serikat untuk memajukan strategi Indo-Pasifiknya. Australia secara nyata berusaha untuk meningkatkan status dan pengaruhnya dalam sistem aliansi Amerika

Serikat dan juga kawasan Indo-Pasifik. AUKUS akan menjadi sebuah pilihan yang menentukan bagi masa depan Australia dan wilayah Indo-Pasifik.

Ambisi Australia untuk meningkatkan proyeksi kekuatannya juga sejalan dengan keinginan Amerika Serikat untuk melakukan penyeimbangan kekuatan di kawasan Indo-Pasifik agar eksistensinya tidak kalah saing dengan Tiongkok. Posisi Amerika Serikat juga semakin tertekan akibat kehilangan kepercayaan untuk menekan Tiongkok di Eurasia. Di samping itu, hubungan Amerika Serikat dengan Uni Eropa juga renggang setelah berakhirnya masa jabatan Presiden Trump dan terjadinya peristiwa Brexit. Itulah yang membuat Amerika Serikat berani menggandeng Australia dan Inggris sebagai mitra kerjasama pertahanan karena telah berbagi sejarah sejak dulu. Alasan lain Amerika Serikat dan Inggris secara aktif menawarkan kerjasama keamanan dan berbagi teknologi dengan negara lain adalah untuk menggalang dukungan politik dan militer di tengah struktur internasional yang anarki. Bagi Amerika Serikat, AUKUS akan menjadi pilihan terbaik dalam memastikan keterlibatan mereka guna menjamin kondisi keamanan di kawasan yang sangat berpengaruh di dunia ini (Cheng, 2022).

Namun, ambisi Australia, Inggris dan Amerika Serikat melalui proyek AUKUS yang memiliki misi untuk menciptakan stabilitas keamanan kolektif di Indo-Pasifik dipandang masih utopis. Itu dikarenakan AUKUS belum mendapatkan kepercayaan secara penuh dari negara-negara di kawasan Indo-Pasifik. Krisis kepercayaan tersebut muncul atas dasar naluri dari suatu negara akan bentuk ancaman baru yang dapat menghalangi pencapaian kepentingan nasionalnya. Setiap negara juga berambisi untuk menjaga keamanan nasionalnya agar bisa *survive* di tengah sistem internasional yang anarki. Organisasi kawasan Indo-Pasifik seperti ASEAN juga dikesampingkan peran sentralnya dari proyek AUKUS. Kondisi ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat dan sekutunya tidak terlalu memperhatikan ASEAN sebagai organisasi regional yang berkontribusi pada pembangunan keamanan wilayah Indo-Pasifik.

Pandangan utopis terhadap AUKUS juga disebabkan oleh beberapa bentuk kesepakatan serupa di Indo-Pasifik mengalami kegagalan untuk menciptakan keamanan kolektif. Salah satu kesepakatan tersebut adalah ANZUS. ANZUS adalah perjanjian keamanan antara Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat yang bertujuan untuk menjaga keamanan Pasifik dengan mengkoordinasikan pertahanan bersama di Pasifik dan mencegah komunisme, yang dianggap sebagai pengganggu di kawasan Asia-Pasifik, terutama dari Republik Rakyat Tiongkok dan Uni Soviet. Tetapi misi dari ANZUS tersebut tidak berjalan mulus, karena salah satu negara yaitu New Zealand mengundurkan diri dari keanggotaannya. New Zealand menyatakan negaranya sebagai zona bebas nuklir dan menolak untuk mengizinkan kapal selam bertenaga nuklir Amerika Serikat mengunjungi pelabuhannya. Keluarnya New Zealand dari ANZUS mengurangi efisiensi sistem pertahanan dan keamanan yang dibangun oleh ANZUS. (Office of the Historian , 2019).

Terdapat pula organisasi pertahanan regional yang bertujuan untuk membendung pengaruh komunis di kawasan Asia Tenggara juga mengalami kegagalan untuk menjaga keamanan kolektif dari kawasan. Organisasi tersebut disebut dengan SEATO (*Southeast Asia Treaty Organization*). SEATO ini merupakan aliansi militer pimpinan Amerika Serikat yang keanggotaannya terdiri dari Inggris, Prancis, Pakistan, Australia, Selandia Baru dan dua negara Asia Tenggara yaitu Thailand dan Filipina. Namun, misi yang dibangun oleh SEATO tidak dapat berjalan dengan baik karena SEATO hanya mengandalkan kekuatan mencolok dari negara-negara anggotanya. SEATO pada akhirnya dibubarkan karena terjadi perubahan besar di kawasan Asia Tenggara, khususnya yang terkait dengan kekalahan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam (Viandari Kharti, 2022).

Berangkat dari beberapa bentuk kesepakatan yang gagal langgeng untuk menjaga keamanan kolektif di kawasan Indo-Pasifik membuat AUKUS juga dipandang menjanjikan hal yang sama. Dengan kehampirsamaan maksud untuk mengejar kepentingan strategis di kawasan

Indo-Pasifik melalui proyek pembuatan kapal selam bertenaga nuklir, Australia, Inggris dan Amerika Serikat telah membuka potensi terjadinya pergulatan kekuatan di arena Indo-Pasifik. Ide keamanan kolektif yang dibawa sebagai misi AUKUS nyatanya semata-mata memfokuskan pada sistem pertahanan keamanan bagi negara-negara anggota. Australia, Inggris dan Amerika Serikat sebagai penggagas AUKUS yang nantinya akan pertama kali mendapatkan kebermanfaatannya melalui proyek kapal selam untuk menjaga keamanan sekaligus mempertahankan dominasinya.

Kekhawatiran terhadap Potensi Eskalasi Konflik di Kawasan Indo-Pasifik

Sejak pengumuman inisiatif 'AUKUS' pada September 2021, kontroversi tentang perannya dan signifikansi sebagian besar terus berlanjut. AUKUS seolah melupakan bahwa keamanan kolektif yang berupaya diciptakan membutuhkan koordinasi dan kesediaan dari negara-negara lain di kawasan tersebut. Beberapa negara Indo-Pasifik masih meragukan keniscayaan AUKUS untuk menciptakan keamanan regional bagi Indo-Pasifik. Negara seperti Indonesia dan Malaysia menjadi salah dua negara yang menyatakan penolakan sejak disepakatinya AUKUS. Mereka menyatakan ada banyak alasan logis yang mendasari mereka untuk menolak proyek trilateral pengembangan kapal selam itu.

Indonesia melalui Duta Besar Indonesia untuk Australia telah mengemukakan keprihatinan baru tentang proyek AUKUS dan memperingatkan bahwa AUKUS tidak boleh memicu perlombaan senjata hipersonik di wilayah Indo-Pasifik. Hal tersebut menjadi kekhawatiran karena pengaturan mengenai senjata yang dapat bergerak setidaknya lima kali belum banyak diatur dalam aturan yang berlaku secara regional maupun internasional (Hurst, 2022). Terbatasnya aturan mengenai persenjataan tersebut memungkinkan adanya pelanggaran terhadap penggunaan senjata hipersonik yang dapat mengancam keamanan nasional maupun wilayah di suatu kawasan. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara non-blok yang menjalankan politik luar negeri

bebas aktif. Itu yang membuat Indonesia memiliki hubungan baik dengan kedua kubu kekuatan besar dan sekutunya. Namun, hal tersebut justru membuat sikap Indonesia menjadi dilema setiap kali menghadapi isu internasional. Meskipun begitu, sikap Indonesia yang tidak memihak siapapun tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sangat berkomitmen dalam mencegah kemungkinan terpecahnya kubu negara ASEAN yang juga akan mendapatkan dampak dari proyek AUKUS.

Kemudian, Malaysia melalui Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob juga merasakan kekhawatiran yang hampir sama dengan Indonesia. Beliau mengatakan bahwa AUKUS dapat memprovokasi kekuatan lain untuk bertindak lebih agresif, terutama di Laut Tiongkok Selatan (CNN Indonesia, 2021). Hal tersebut tentunya akan bersangkutانب kembali dengan sengketa klaim batas wilayah perairan di Laut Tiongkok Selatan yang hingga kini masih kerap kali mengalami ketegangan. Terlebih lagi, Tiongkok muncul sebagai salah satu agresor baru yang sedang berkembang dengan berbagai bentuk agresivitas tindakan terhadap pesaingnya. Maka dari itu, akan memicu signifikansi proyeksi kekuatan melalui perlombaan senjata (*arm race*) khususnya bagi negara yang bersinggungan di wilayah Indo-Pasifik.

Rencana pengembangan kapal selam yang berinstrumen gabungan teknologi dari tiga negara, yaitu Australia, Inggris dan Amerika Serikat menjadi satu dari sekian banyak alasan logis yang membuat kekhawatiran. Kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih yang dimiliki oleh Australia, Inggris dan Amerika Serikat akan menciptakan jenis kapal selam baru dengan nama SSN-AUKUS. Pembangunan kapal selam tersebut tentu akan saling berkolaborasi baik dalam hal desain, komponen dan suku cadang termasuk teknologi yang akan melengkapi dalam pelayaran dan persenjataan kapal. Ketiga negara akan bekerja sama selama beberapa dekade untuk bisa menyelesaikan proyek utama ini dibarengi dengan beberapa bentuk kesepakatan lainnya yang mendukung komitmen bersama ketiga negara, seperti pembangunan infrastruktur dan pangkalan, pelatihan personil militer dan lainnya. Hal tersebut, memungkinkan

terbentuknya basis kekuatan militer yang semakin kuat, mengintegrasikan basis industri serta rantai pasokan sambil memperkuat rezim keamanan masing-masing negara di tengah berbagai ancaman keamanan lainnya di kawasan Indo-Pasifik. (The White House, 2023).

Di samping itu, rencana penggunaan tenaga nuklir dalam kapal selam juga turut menjadi kecemasan bagi beberapa negara Indo-Pasifik di tengah telah disepakatinya perjanjian non-proliferasi nuklir. Kebijakan mengenai non-proliferasi nuklir sudah ditandatangani sejak 1 Juli 1968 yang mana 187 negara berdaulat mengikuti perjanjian ini. Perjanjian ini mulai berlaku setelah diratifikasi oleh Inggris, Uni Soviet, Amerika Serikat, dan 40 negara lainnya pada 5 Maret 1970 dengan tiga pokok utama, yaitu nonproliferasi, perlucutan, dan hak untuk menggunakan teknologi nuklir untuk kepentingannya (US Department of State, 2018). Perjanjian tersebut menjadi komitmen dunia internasional untuk menjaga dunia dari dampak yang bisa diakibatkan oleh nuklir. Apabila negara menggunakan senjata nuklir, ledakan nuklir akan melepaskan sejumlah besar energi dalam bentuk ledakan, panas, dan radiasi yang berakibat baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Secara singkat, ledakan nuklir dapat menyebabkan kematian puluhan juta orang, menghancurkan lingkungan dan gangguan iklim hingga berdampak pada keterpurukan sosial ekonomi masyarakat.

Australia sendiri sudah terikat dengan perjanjian non-proliferasi nuklir secara internasional dan regional. Di regional, Australia merupakan penandatangan Traktat Rarotonga (juga dikenal sebagai Traktat Zona Bebas Nuklir Pasifik Selatan). Para penandatangan Traktat Rarotonga telah secara efektif setuju untuk mempertahankan zona bebas senjata nuklir di Pasifik Selatan. Perjanjian itu menetapkan bahwa “alat peledak nuklir” tidak boleh memasuki zona bebas nuklir yang digariskan dalam perjanjian tersebut. Ini juga mencakup batasan lain pada distribusi dan perolehan bahan fisil nuklir (yang merupakan bahan yang dapat digunakan dalam bom nuklir) kecuali tunduk pada pengamanan khusus (Sanders, 2023).

Namun, karena kemunculan AUKUS yang memiliki kesepakatan pembuatan kapal selam bertenaga nuklir, jaminan mengenai tidak digunakannya nuklir sebagai senjata dalam proyek tersebut masih diragukan. Penggagas AUKUS juga hanya “menjanjikan” bahwa penggunaan nuklir di proyek AUKUS akan digunakan untuk tujuan damai yang belum bisa dilihat kenyataannya. Kemitraan AUKUS dipandang masih memiliki banyak celah yang dapat berisiko mengarah pada pengabaian komitmen nonproliferasi nuklir. Itulah yang kemudian mendorong adanya ketakutan dari berbagai negara akan pengaruh dan dampak yang dihasilkan dari kesepakatan AUKUS.

Proyek yang direncanakan AUKUS berupa pembuatan kapal selam bertenaga nuklir akan menambah dinamika ketidakstabilan keamanan regional Asia Tenggara. Hal itu terjadi, di samping karena letak geografis Australia yang berdekatan dengan ASEAN, adanya sengketa batas wilayah perairan dengan Tiongkok yang melibatkan beberapa negara anggota ASEAN, ASEAN juga memiliki traktat *Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone* (SEANWFZ). Keberadaan traktat ini merupakan komitmen ASEAN untuk melestarikan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional. Apabila kapal selam bertenaga nuklir tersebut berlayar melintasi wilayah perairan ASEAN maka akan melanggar traktat SEANWFZ yang disepakati oleh negara-negara ASEAN pada 15 Desember 1995. (Purwantoro Putro, 2021)

Kondisi kekhawatiran tersebut menunjukkan bahwa konsep fundamental dari pemikiran neorealisme yakni anarki serta kepentingan nasional tampak begitu mendominasi dalam pembentukan masalah ini (Baldwin, 1983). Neorealisme menekankan pada struktur sistem internasional dan bagaimana hal tersebut bisa mempengaruhi perilaku negara. Sistem internasional yang anarki yang mana ketiadaan pemerintah dunia menyebabkan tidak ada aktor lain yang bisa menjamin bahwa Australia, Inggris dan Amerika Serikat menggunakan kapasitas kapal selam nuklir mereka, tanpa mengganggu

kepentingan nasional dari negara-negara di kawasan Indo-Pasifik. Ketiadaan otoritas global ini juga pada akhirnya memaksa negara-negara untuk mencari keamanan mereka sendiri melalui akumulasi power. Hal tersebut terlihat dari Australia, Inggris dan Amerika Serikat melalui pembentukan kesepakatan AUKUS yang dipandang sebagai respon atas agresivitas Tiongkok. Itulah yang kemudian menyebabkan persaingan dan konflik serta meningkatkan dilema keamanan yang terjadi diantara negara yang bersangkutan.

Selain itu, rival dari Amerika Serikat yakni Tiongkok juga menentang kesepakatan trilateral ini. Seorang juru bicara kementerian luar negeri China, Zhao Li Jian, mengatakan keputusan Amerika Serikat, Inggris dan Australia untuk membangun proyek kapal selam bertenaga nuklir adalah kasus standar ganda yang sangat tidak bertanggung jawab. Beliau juga mengatakan bahwa pakta trilateral tersebut secara serius dapat merusak perdamaian regional dan mengintensifkan perlombaan senjata (Davidson & Blair, 2021). Juru bicara Tiongkok lainnya yaitu Wang Wenbin menyatakan bahwa jaminan pakta AUKUS tidak akan merusak sentralitas ASEAN, atau menimbulkan ancaman bagi perdamaian regional adalah sebuah penjelasan yang lemah untuk menenangkan kekhawatiran negara Indo-Pasifik. Wang menambahkan bahwa kemitraan keamanan trilateral tersebut mengejar "aturan rimba", di mana yang lemah akan dikalahkan oleh yang kuat dan melanggar tujuan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir dan komitmen Indo-Pasifik sebagai zona bebas nuklir. (ABC, News, 2021).

Tiongkok juga secara tanggap mengajukan permohonan untuk bergabung dengan CPTPP atau *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership* sehari setelah AUKUS diresmikan. Langkah ini disebut sebagai respon Tiongkok untuk mengimbangi kekuatan yang berusaha menekan eksistensi Tiongkok di Indo-Pasifik. Permohonan tersebut juga disebut sebagai upaya yang agresif untuk memisahkan blok perdagangan antara Amerika Serikat dan sekutunya. Disamping itu, permohonan untuk bergabung dengan CPTPP akan menguntungkan bagi Tiongkok karena partisipasinya akan mereformasi dan

membuka ekonomi lebih signifikan lagi. Keanggotaan Tiongkok dalam CPTPP juga akan membantu negara lain memperkuat kerja sama dengan Tiongkok untuk perdagangan barang dan jasa, investasi, dan di bidang lain (Wong, 2022).

Di sisi lain, ASEAN yang merupakan salah satu organisasi regional yang dibentuk oleh negara-negara Asia Tenggara juga turut memberikan respon terhadap pembentukan AUKUS. Respon yang diberikan ASEAN disampaikan langsung oleh masing-masing negara anggotanya sehingga respon ASEAN ini dibagi menjadi tiga kelompok. Pertama, Malaysia dan Indonesia secara terbuka menunjukkan keprihatinan dan kecemasan akan resiko proliferasi nuklir dan perlombaan senjata, tetapi tidak secara eksplisit menentang AUKUS. Kedua, Thailand, Kamboja, Laos, Brunei, dan Myanmar telah memutuskan untuk tidak memberikan komentar terbuka dan tidak ambigu. Tanggapan singkat mereka dapat diartikan sebagai penerimaan diam-diam terhadap AUKUS. Ketiga, Filipina, Vietnam, dan Singapura seolah-olah mendukung pakta keamanan baru yang dianggap dapat menjadi basis perlindungan yang lebih memadai bagi keamanan mereka dan stabilitas regional (Li, 2022). Melihat respon ASEAN yang beragam membuktikan bahwa ada ketidaksatuan suara ASEAN dalam menanggapi isu konteks regional.

Lebih lanjut respon beragam dari negara anggota ASEAN semakin memperlihatkan ketidaktertarikan ASEAN dalam mengambil sikap dan suara terhadap perubahan konstelasi keamanan yang berpotensi besar mengancam stabilitas kawasan ASEAN sendiri (Singarimbun, 2021). Hingga saat ini ASEAN belum mengeluarkan pernyataan resmi secara bersama untuk menanggapi pembentukan AUKUS. ASEAN sebagai kesatuan organisasi memilih bungkam dalam merespons isu-isu sensitif karena kebijakan non-intervensi yang telah disepakati di organisasi tersebut. Hal tersebut memunculkan anggapan bahwa ASEAN takut akan terjadinya perpecahan di regional yang berujung pada melemahnya sentralitas ASEAN di kawasan. ASEAN sebenarnya memiliki kapasitas untuk merespon AUKUS dengan mengeluarkan

sikap melalui joint statement ASEAN secara kolektif sehingga dapat mempertahankan sentralitas ASEAN di kawasan. ASEAN juga harusnya dapat menerapkan kebijakan yang lebih konkret dalam merespon dinamika keamanan di kawasan.

Pada akhirnya, kemitraan AUKUS yang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik, justru menjadi kontradiktif dengan beragam respon yang diterima dari berbagai pihak. Banyak pihak skeptis dalam memandang AUKUS sebagai realitas baru yang bermanfaat bagi kelompok secara kolektif. Pembentukan AUKUS masih menjadi kekhawatiran bagi sebagian besar negara akan bentuk proyek nyatanya. Kebermanfaatannya dari AUKUS juga dipandang hanya bagi sebagian kecil kelompok great power. AUKUS akan lebih banyak membawa potensi konflik dan perpecahan di kawasan Indo-Pasifik.

KESIMPULAN

AUKUS adalah sebuah proyek pembuatan kapal selam bertenaga nuklir yang digagas oleh Australia, Inggris dan Amerika Serikat. Kesepakatan tersebut merupakan titik krusial dari tujuan ketiga negara dalam pertukaran informasi dan teknologi dalam sejumlah bidang seperti teknologi kuantum, intelijen dan pengadaan misil jelajah. Komitmen untuk menciptakan keamanan secara kolektif di Indo-Pasifik oleh AUKUS masih menjadi keniscayaan yang belum terealisasi. Ide keamanan kolektif yang dibawa AUKUS cenderung dilihat dapat menyebabkan dinamika yang semakin kompleks di tengah potensi Indo-Pasifik sebagai pusat gravitasi ekonomi dan geopolitik dunia. Gabungan tiga kemampuan teknologi, pelanggaran terhadap perjanjian non-proliferasi nuklir, hingga menyurutkan sentralisasi organisasi kawasan menjadi sekian banyak dasar yang dapat menyebabkan potensi eskalasi konflik di kawasan Indo-Pasifik. AUKUS dipandang hanya akan menjadi instrumen bagi Australia, Inggris dan Amerika Serikat untuk mencapai kepentingan strategisnya, berupa perlawanan terhadap Tiongkok dan mempertahankan hegemoninya di kawasan. Di sisi lain, sebagai akibat dari wacana kapal selam tenaga nuklir yang berpotensi menghasilkan perlombaan senjata, AUKUS telah berubah menjadi katalisator yang

akan memperburuk stabilitas keamanan wilayah tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya AUKUS dapat berdampak pada masalah keamanan dan kerumitan geopolitik Indo-Pasifik.

DAFTAR PUSTAKA

- Baldwin, D. A. (1983). *Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary Debate*. New York: Columbia University Press.
- Cheng, M. (2022). AUKUS: The Changing Dynamic and Its Regional Implications. *European Journal of Development Studies*, 2(1), 1–7. <https://doi.org/10.24018/ejdevelop.2022.2.1.63>
- CNN Indonesia. (2021, November 23). *Deret Negara ASEAN yang Dukung Vs Tolak AUKUS Seperti China - Halaman 2*. Internasional. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20211122150656-106-724474/deret-negara-asean-yang-dukung-vs-tolak-aukus-seperti-china/2>
- Davidson, H., & Blair, G. (2021, September 16). “Cold war mentality”: China criticises US-UK-Australia submarine pact. The Guardian. <https://www.theguardian.com/world/2021/sep/16/cold-war-mentality-china-criticises-aukus-us-uk-australia-submarine-pact>
- Delanova, M. O. (2021). Dampak Pakta Pertahanan Trilateral AUKUS Terhadap Kondisi Regional Indo-Pasifik. *Jurnal Dinamika Global*, 6(02), 259–285. <https://doi.org/10.36859/jdg.v6i2.408>
- Donnelly, J. (2000). *Realism and International Relations*. Cambridge University Press. <https://ir101.co.uk/wp-content/uploads/2018/11/Donnelly-2000-Realism-and-International-Relations.pdf>
- Forum Regional Asean Arf | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (n.d.). *Www.kemlu.go.id*. Retrieved from https://www.kemlu.go.id/portal/id/list/halaman_list_lainnya/94/forum-regional-asean-arf
- Hurst, D. (2022, November 2). *Indonesian ambassador warns Australia Aukus pact must not fuel a hypersonic arms race*. The Guardian. <https://www.theguardian.com/australia-news/2022/nov/03/indonesian-ambassador-warns-australia-aukus-pact-must-not-fuel-a-hypersonic-arms-race-in-the-region>
- Istri Laksmi Dewi, A. A. (2014). Penguatan Hubungan Militer Australia dan Amerika Serikat dalam ANZUS Pada Tahun 2001 – 2005 | DIKSHI (DISKUSI ILMIAH KOMUNITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL). *Ojs.unud.ac.id*. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/9969/7426>
- Li, M. (2022). ASEAN’s responses to AUKUS: implications for strategic realignments in the Indo-Pacific. *China International Strategy Review*. <https://doi.org/10.1007/s42533-022-00121-2>
- Mearsheimer, J. J. (2019). Realism and Restraint. *Horizons: Journal of International Relations and Sustainable Development*, 14, 12–31. <https://www.jstor.org/stable/48573725>
- Nindya, A. P., & Abiyya, R. A. (2022). Pengaruh AUKUS terhadap Stabilitas Indo-Pasifik dan Sikap Indonesia [The Influence of AUKUS to Indo-Pacific Regional Stability and Indonesia’s Stance]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 13(1), 67–84. <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/2917/1029>
- Office of the Historian . (2019). *Milestones: 1945–1952 - Office of the Historian*. State.gov. <https://history.state.gov/milestones/1945-1952/anzus>
- Pangestu, L. G., Hikmawan, R., & Fathun, L. M. (n.d.). *Strategi Indonesia Mewujudkan ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) Untuk Menciptakan Stabilitas di Kawasan Indo-Pasifik*. <https://repository.upnvj.ac.id/7467/11/ARTIKEL%20KI.pdf>
- Pradana, M. E. (2022). *Neorealisme: Sebuah Pengantar Singkat – IR Corner*.

- https://www.ircorner.com/neorealis-me-sebuah-pengantar-singkat/#_ednref1
- Purwantoro Putro , Y. B. Y. (2021, November 17). *Menyikapi Potensi Eskalasi Konflik Di Kawasan Indo-Pasifik Sebagai Dampak Dari Kesepakatan Aukus*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. <https://setkab.go.id/menyikapi-potensi-eskalasi-konflik-di-kawasan-indo-pasifik-sebagai-dampak-dari-kesepakatan-aukus/>
- “Rules of the jungle”: China ups the rhetoric against Australia, US and UK over AUKUS deal. (2021, October 22). *ABC News*. <https://www.abc.net.au/news/2021-10-23/china-aukus-pact-nuclear-proliferation-regional-stability/100562476>
- Sanders, L. (2023b). *If AUKUS is all about nuclear submarines, how can it comply with nuclear non-proliferation treaties?* UQ News. <https://www.uq.edu.au/news/article/2023/03/if-aukus-all-about-nuclear-submarines-how-can-it-comply-nuclear-non-proliferation>
- Singarimbun, L. (2021, October 5). *AUKUS, Sentralitas ASEAN, dan Keamanan Regional*. Detiknews. <https://news.detik.com/kolom/d-5753713/aukus-sentralitas-asean-dan-keamanan-regional>
- Sinta Herindrasti, V. (2019). Fenomena Indo-Pasifik dan Diplomasi Indonesia. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 3(1). <https://doi.org/10.33541/japs.v3iq.965>
- The White House. (2023, March 13). *Joint Leaders Statement on AUKUS*. The White House. <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/03/13/joint-leaders-statement-on-aukus-2/>
- U.S. Embassy Jakarta. (2021, December 17). *Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka*. Kedutaan Besar Dan Konsulat as Di Indonesia. <https://id.usembassy.gov/id/indo-pasifik-yang-bebas-dan-terbuka/>
- US Departemen of State. (2018). *Nuclear Non-proliferation Treaty - United States Department of State*. United States Department of State. <https://www.state.gov/nuclear-nonproliferation-treaty/>
- Viandari Kharti, I. S. (2022, August 10). 5 *Organisasi Militer Internasional | Sejarah Kelas 12*. <https://www.ruangguru.com/blog/organisasi-militer-internasional>
- Wong, K. (2022, May 5). *What is the CPTPP and why is China eager to join?* South China Morning Post. <https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3176487/what-cptpp-and-why-china-eager-join>